

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KECAMATAN MOJOROTO
KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

Wamai Abdul Barru Dhebuja Musnamar

NPP. 30.0864

Asdaf Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik

Email: barrumunasmr@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Raddana, M. Pd., M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): In 2021 the most frequent disasters in Indonesia are floods. The city of Kediri itself is one of the cities that was hit by a flood disaster. Mojoroto District is the most frequent location for this disaster. For this reason, BPBD Kota Kediri focuses on empowering the flood disaster mitigation community **Purpose:** to increase knowledge, skills and community awareness, so as to minimize the incidence of flood disasters in Mojoroto District. The focus of BPBD in carrying out community empowerment is to form and develop community organizations related to disasters, increase community capacity and self-reliance, collaborate with other related OPDs in implementing community empowerment such as environmental preservation, maintenance of facilities and infrastructure, and sustainable development. This was all done to meet the indicators of community empowerment carried out by BPBD. **Method:** In this writing the author uses a qualitative research design with descriptive methods and inductive approaches. Sources of research data were obtained through interviews with ASN BPBD Kota Kediri, and other related regional apparatus organizations, as well as interviews and observations of sub-district officials and their communities in flood-affected sub-districts in Mojoroto District. **Results/Findings:** The findings show that community empowerment in the Mojoroto District such as outreach, training, collaboration with the community is quite good, however there are several things that need to be considered such as the absence of a routine and consistent schedule in conducting disaster risk reduction discussion forums, the lack of widespread socialization and training received by the flood-affected kelurahan community, there are still people who do not have high awareness. **Conclusion:** In the future, it is hoped that the BPBD will make a regular schedule to discuss problems with the community, provide online outreach and training for a wider scope.

Keywords: Disaster mitigation, flood, Kediri City Regional Disaster Management Agency

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Tahun 2021 bencana yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah banjir. Kota Kediri sendiri merupakan salah satu kota yang dilanda bencana banjir. Kecamatan Mojojoto menjadi lokasi paling sering terjadinya bencana tersebut. Untuk itu BPBD Kota Kediri memfokuskan pemberdayaan masyarakat mitigasi bencana banjir. **Tujuan:** tujuan penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan, skill, dan kepedulian masyarakat, sehingga dapat meminimalisir kejadian bencana banjir di Kecamatan Mojojoto. Fokus BPBD dalam melakukan pemberdayaan masyarakat yaitu membentuk dan mengembangkan organisasi kemasyarakatan terkait dengan kebencanaan, meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, berkolaborasi dengan OPD terkait lainnya dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat seperti pelestarian lingkungan, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan pembangunan berkelanjutan. Itu semua dilakukan untuk memenuhi indikator pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BPBD. **Metode:** Dalam penulisan ini Penulis menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Sumber data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan ASN BPBD Kota Kediri, dan Organisasi perangkat daerah terkait lainnya, serta wawancara dan observasi perangkat kelurahan dan masyarakatnya di kelurahan yang terdampak banjir di Kecamatan Mojojoto. **Hasil/Temuan:** Hasil temuan menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mojojoto seperti sosialisasi, pelatihan, kolaborasi dengan masyarakat sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti belum adanya jadwal rutin dan konsisten dalam melakukan forum diskusi pengurangan resiko bencana, belum meluasnya sosialisasi dan pelatihan yang diterima oleh masyarakat kelurahan terdampak banjir, masih ada masyarakat yang belum memiliki kesadaran yang tinggi. **Kesimpulan:** Kedepannya diharapkan BPBD membuat jadwal rutin untuk membahas permasalahan bersama masyarakat, memberikan sosialisasi dan pelatihan secara online untuk cakupan yang lebih luas.

Kata Kunci: Mitigasi bencana, banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Nugroho (2019) Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang rawan terhadap bencana. Tidak bisa dipungkiri pernyataan tersebut dikarenakan Indonesia bagian dari cincin api Pasifik atau bisa disebut dengan *ring of fire*, adapun Indonesia juga memiliki tiga lempeng Tektonik yang aktif, serangkaian gunung berapi aktif dan garis khatulistiwa yang melalui letak geografis negara Indonesia.

Menurut data dari BNPB tahun 2022 Kejadian bencana terbanyak yang terjadi di Indonesia selama tahun 2021 adalah bencana banjir yaitu sebanyak 1.794 kejadian di seluruh Indonesia. Oleh karenanya permasalahan bencana banjir perlu dikaji kembali disetiap daerah di Indonesia terutama di daerah yang rawan terjadi bencana banjir. Kemudian pada penelitian kali ini penulis akan mengkaji daerah Kota Kediri yang berada di Provinsi Jawa Timur dimana merupakan salah satu daerah yang masih terjadi bencana banjir di kota tersebut. Kota Kediri sendiri terbagi menjadi 3 kecamatan dan merupakan kota yang dialiri oleh sungai brantas, sungai brantas tersebut memiliki 7 anak sungai yang tersebar di 3 kecamatan yang berada di Kota Kediri adapun yaitu sungai kresek, parang, kedak, brantas, ngampel, tawang dan bruno.

Kejadian bencana banjir di Kota Kediri paling banyak terjadi di Kecamatan Mojoroto yaitu sejumlah 9 kejadian bencana, pada urutan kedua adalah Kecamatan Kota sejumlah 4 kejadian dan yang terakhir adalah Kecamatan Pesantren yang tidak ada kejadian bencana banjir di wilayah tersebut selama 3 tahun kebelakang. Oleh karena itu perlu dikaji lebih dalam lagi mengapa Kecamatan Mojoroto menjadi kecamatan dengan jumlah kejadian banjir tertinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Oleh karenanya BPBD diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan bencana banjir di Kecamatan Mojoroto ini, namun disini selain BPBD terdapat unsur masyarakat yang merupakan ujung tombak dalam menyelesaikan permasalahan bencana banjir di Kecamatan Mojoroto, disebut ujung tombak dikarenakan masyarakat adalah unsur yang beraktivitas sehari-hari di wilayah tersebut, maka masyarakat di wilayah tersebut diharapkan memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan mengenai mitigasi bencana banjir di wilayah kecamatannya yang menurut data BPBD adalah kecamatan yang paling sering terjadi bencana banjir diantara 2 kecamatan lainnya.

Jim Ife (1997) dalam bukunya yang berjudul *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice* menjelaskan bahwa pengertian dari pada pemberdayaan adalah memberikan kesempatan, sumber daya, ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat itu sendiri guna terwujudnya cita-cita ke depan masyarakat tersebut dan dapat ikut andil dalam usaha memberikan pengaruh kepada kehidupan kelompok masyarakat yang telah ada sehingga dapat bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang terdapat di wilayah masyarakat tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kota Kediri memiliki 3 Kecamatan, Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren, diantara 3 kecamatan tersebut menurut data dari BPBD Kota Kediri Kecamatan Mojoroto merupakan kecamatan yang paling sering terjadi bencana banjir dalam 3 tahun terakhir yaitu sejumlah 9 kejadian bencana yang terdiri dari 4 kejadian di Kelurahan Campurejo, 3 kejadian di Kelurahan Bujel, 1 kejadian di Kelurahan Mojoroto dan 1 kejadian di Kelurahan Pojok. Oleh karena itu perlu dikaji lebih dalam lagi mengapa Kecamatan Mojoroto menjadi kecamatan dengan jumlah kejadian banjir tertinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain.

Permasalahan banjir yang terjadi di Kecamatan Mojoroto perlu ditanggapi serius oleh instansi pemerintah yang berwenang yang disini yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri. Tentu dalam proses pengurangan resiko bencana banjir ini BPBD Kota Kediri tidak bisa maksimal jika hanya BPBD yang berusaha, tentu hal ini membutuhkan support dari Organisasi Perangkat Daerah lain yang terkait, organisasi masyarakat, dan tentunya masyarakat yang langsung tinggal di wilayah rawan terjadinya bencana banjir. Masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut merupakan salah satu kunci utama untuk menjadi bagian dalam usaha untuk pengurangan resiko bencana banjir di daerahnya, untuk itu BPBD Kota Kediri bersama OPD lain terkait harus berupaya untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang mitigasi bencana banjir kepada masyarakat agar masyarakat memiliki pengetahuan, skill dan kesadaran untuk bersama-sama melakukan mitigasi bencana banjir di daerahnya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang diambil dari penelitian sebelumnya adalah penelitian dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Banjir Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua oleh Salomo Payokwa (2022) . Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana dan faktor penghambat serta upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Papua. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pada pelaksanaan belum dilakukan secara optimal dikarenakan kesadaran masyarakat dan fasilitas di Distrik Sentani yang kurang.

Penelitian berikutnya yaitu diteliti oleh Anggun dkk (2020) dengan judul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kecamatan Padang Selatan. Adapun penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisa dan mengatasi permasalahan kurang maksimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana banjir yang ada di Kecamatan Padang Selatan, keefektifan pelatihan yang sudah diberikan oleh pemerintah, tingkat kemandirian masyarakat dalam mitigasi bencana banjir, sop yang jelas pada masyarakat dalam melakukan upaya mitigasi bencana banjir, dan yang terakhir adalah tingkat prioritas bencana banjir di Kecamatan Padang Selatan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa fenomena yang ditemukan peneliti di lapangan adalah pemberdayaan masyarakat belum dilakukan

secara optimal. Hal ini dikarenakan adanya ketergantungan masyarakat yang masih tinggi pada instansi pemerintahan; Kedua, Pelatihan terkait bencana banjir masih belum efektif dilakukan hanya dilakukan satu kali setahun; Ketiga, Tidak adanya SOP serta tujuan yang jelas dari KSB untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat; Keempat, Bencana banjir belum menjadi prioritas utama dalam upaya pengurangan risiko bencana yang terjadi di Kota Padang. Hal ini karena keterbatasan dana yang dimiliki BPBD Kota Padang, dan saat ini yang menjadi prioritas BPBD Kota Padang adalah bencana gempa bumi dan tsunami.

Penelitian terakhir yang dijadikan acuan yaitu penelitian ketiga dengan judul Peran BPBD dalam Pemberdayaan Penanganan Banjir Bandang di Kelurahan Lodoyong, Ambarawa, Semarang oleh Hasan dkk (2022). Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran BPBD Semarang dalam kegiatan pemberdayaan penanggulangan banjir bandang di Kelurahan Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPBD dalam penanggulangan bencana dilakukan pada tahap Pra-bencana dengan membentuk kesiapsiagaan masyarakat dan pasca banjir melakukan evakuasi, bantuan logistik dan perbaikan infrastruktur publik. Berbagai tindakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan pemulihan kondisi sosial ekonomi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penelitian ini menganalisis dan membahas tentang bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, dimana Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana banjir di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Provinsi Jawa Timur.

Sementara penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai *penelitian terkait* hanya meninjau dari satu sudut pandang seperti penelitian yang dilakukan oleh Salomo Payokwa (2022) dimana lebih memfokuskan pada gambaran mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana banjir melalui badan penanggulangan bencana daerah di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. dan penelitian yang dilakukan oleh Anggun dkk (2020) yang meletakkan titik fokus pada mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di kecamatan padang selatan. Selain itu penelitian ini membahas adanya menganalisis dan mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana banjir di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Provinsi Jawa Timur

1.5. Tujuan

Tujuan peneliti dalam membahas penelitian bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Provinsi Jawa Timur yaitu, Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat oleh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana banjir di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, menganalisis dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana banjir di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jawa Timur. Selanjutnya guna mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan upaya pemecahan masalah terhadap faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana banjir di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jawa Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian dirancang untuk dapat menghimpun serta dapat mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi sebenarnya sesuai dengan data dilapangan dengan rangkaian sistematika prosedur dan pertanyaan untuk informan sehingga mampu mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus ke umum. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana yang digunakan oleh peneliti dikembangkan oleh Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato (2013:113) dengan empat dimensi yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, Bina Kelembagaan. digunakan karea dapat menjadi parameter dan menjawab persoalan yang terjadi mengenai Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Provinsi Jawa Timur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Provinsi Jawa Timur

BPBD Kota Kediri memiliki tiga sub bagian yang menjadi tanggung jawab OPD tersebut yang terdiri dari Sub Kedaruratan dan Logistik kemudian Sub Rehabilitasi dan Rekontruksi kemudian yang terakhir adalah Sub Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Pada penulisan kali ini penulis memfokuskan kepada Sub Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam kebencanaan sesuai dengan judul yang diambil oleh penulis yaitu “Pemberdayan Masyarakat Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Provinsi Jawa Timur”.

Banjir merupakan salah satu permasalahan kebencanaan yang ada pada Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Kejadian bencana banjir ini memang paling sering terjadi di wilayah Kecamatan Mojojoto dibandingkan 2 kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren, Oleh karena itu pada pembahasan kali ini penulis memfokuskan kepada pemberdayaan masyarakat oleh BPBD Kota Kediri dalam mitigasi bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Mojojoto. Data ini salah satunya diperoleh dari Kajian Resiko Bencana (KRB) Kota Kediri.

3.1.1 Pembentukan dan Pengembangan Organisasi Masyarakat berbasis Kebencanaan

Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pemberdayaan adalah berfokus kepada pembentukan dan pengembangan organisasi masyarakat berbasis kebencanaan. Oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri berupaya untuk membentuk kelurahan tangguh bencana (Keltana) dan Forum Pengurangan Resiko Bencana sebagai landasan atau pondasi BPBD dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam penulisan ini adalah berfokus kepada pengurangan resiko bencana banjir di Kecamatan Mojoroto.

3.1.2 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kapasitas dan Kemandirian dalam Mitigasi Bencana Banjir

Tujuan dari dilakukannya pemberdayaan kepada masyarakat adalah agar masyarakat tersebut mendapatkan ilmu pengetahuan dan skill baru dalam menyelesaikan suatu permasalahan ataupun mencegah terjadinya suatu permasalahan yang ada. Dalam kasus pada penulisan ini pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berfokus kepada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat terhadap permasalahan dalam mengurangi resiko bencana banjir di wilayahnya.

3.1.3 Peningkatan Pemahaman Pelestarian Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Kepada Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan BPBD dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan juga penting dilakukan, tujuannya adalah agar masyarakat dapat menjaga lingkungan ditengah-tengah kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Mojoroto khususnya di kelurahan yang terdampak langsung bencana banjir. Dengan memperhatikan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan maka sejalan dengan mencegah terjadinya suatu bencana.

Pelestarian dan pembangunan berkelanjutan yang dibahas penulis kali ini berdasarkan kepada Indikator ketiga dalam Totok Mardikanto & Poerwoko Soebito, (2013:113) yaitu bina lingkungan yang artinya adalah akuntabilitas dari pada pemerintah guna mengelola suatu lingkungan yang digunakan untuk tempat pemberdayaan masyarakat dan dapat tetap melindungi situasi kondisi sosialnya.

3.1.4 Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur serta Sarana Prasarana Untuk Mendukung Proses Pemberdayaan Mitigasi Bencana Banjir

Proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana banjir dalam substansi pemberian pemahaman mengenai pembangunan dan perawatan infrastruktur sarana dan prasarana untuk mendukung proses mitigasi bencana banjir merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Dalam pemberdayaan kali ini BPBD Kota Kediri melakukan kolaborasi dengan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri untuk melaksanakan proses sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat mengenai hal tersebut.

Pembahasan sub bab kali ini mengacu kepada teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Totok Mardikanto & Poerwoko Soebiato (2013:113) bina usaha. Pengertian dari pada bina usaha adalah adanya usaha dari pemerintah untuk memenuhi potensi usaha jangka panjang yang sebelum melakukan hal tersebut memastikan terlebih dahulu terhadap peningkatan kemampuan masyarakat, kemudian melihat apakah ada peningkatan kesejahteraan dari faktor ekonomi atau non ekonomi.

Dalam penelitian kali ini penulis berfokus kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sisi non ekonomi yaitu meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat akan proses pembangunan dan perawatan terhadap infrastruktur sarana dan prasana yang berkaitan dengan mitigasi bencana banjir. Jika infrastruktur sarana dan prasarana dapat terpenuhi dan terjaga dengan baik, otomatis dapat meminimalisir bahkan dapat menghilangkan bencana banjir sehingga masyarakat tidak mengalami kerugian dan mengalami peningkatan kesejahteraan.

3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Terkait dengan Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Mojojoto

3.2.1 Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Terkait dengan Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Mojojoto

Pemberdayaan masyarakat Oleh BPBD Kota Kediri di Kecamatan Mojojoto khususnya di kelurahan yang terjadi bencana banjir tentunya tidak sepenuhnya berjalan lancar, ada beberapa hambatan yang ada saat proses tersebut dilakukan. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Belum ada anggaran untuk pemberian sarana secara lengkap kepada masyarakat di kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Mojojoto untuk mendukung proses pengurangan resiko bencana banjir seperti pemberian tabung biopori kepada masyarakat, bantuan alat perkakas untuk bekerja bhakti dalam pengurangan resiko bencana banjir dan sarana lainnya.
2. Belum adanya kegiatan rutin terjadwal untuk melakukan forum diskusi ataupun kegiatan sosialisasi dan pelatihan , kegiatan forum, sosialisasi dan pelatihan dilakukan menyesuaikan dengan keadaan, dilaksanakan belum bisa rutin mengingat banyaknya lokasi yang harus dikunjungi BPBD Kota Kediri dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan.
3. Kurangnya kesadaran beberapa masyarakat di Kecamatan Mojojoto khususnya di Kelurahan yang terdampak banjir untuk menularkan ilmu dan pelatihan yang diberikan oleh BPBD dan rekan OPD seperti menularkan ilmu tentang pembuatan Biopori, praktek dalam melakukan daur ulang sampah, dan kesadaran beberapa oknum masyarakat yang masih

memdabuang sampah sembarangan.

3.2.2 Faktor Pendukung Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Terkait dengan Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Mojoroto

Pemberdayaan masyarakat dalam proses mitigasi bencana banjir di Kecamatan Mojoroto oleh BPBD tentunya tidak bisa dilakukan hanya oleh BPBD saja, namun BPBD juga memerlukan rekan yang dapat membantu dalam proses pelaksanaannya, adapun faktor pendukung BPBD dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terkait dengan mitigasi bencana banjir di Kecamatan Mojoroto yaitu:

1. Kepala wilayah atau lurah merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mitigasi bencana banjir di wilayahnya dikarenakan akan membantu mengkoordinir masyarakatnya seperti contoh pada saat memperbaiki pinggiran sungai dikelurahan mojoroto yang terkikis dan longsor, lurah mengkoordinir masyarakatnya untuk ikut bekerja bakti membantu BPBD dan elemen lainnya.
2. Faktor pendukung lainnya adalah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri yang juga memiliki tupoksi untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan cara melakukan pengelolaan sampah, mengontrol daerah resapan air dan mengontrol saluran drainase, kolaborasi yang dilakukan akan berdampak kepada semakin bertambahnya ilmu yang masyarakat peroleh mengenai mitigasi bencana banjir.
3. Kemudian faktor pendukung selanjutnya adalah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Kediri yang membantu pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana banjir dalam sektor pengetahuan tentang pemenuhan dan pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasana penunjang dalam mitigasi bencana banjir. Seperto perbaikan pinggiran sungai yang melibatkan masyarakat, itu merupakan salah satu contoh pemeliharaan infrastruktur.
4. Faktor pendukung yang keempat adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri, dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana banjir, Bappeda Kota Kediri memiliki tanggung jawab dalam kepengurusan program pemerintah daerah Kota Kediri yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Prodamas Plus) yang merupakan penyaluran dana kepada masyarakat di setiap RT melalui kelurahan, dan nantinya terdapat dana yang disisihkan untuk giat mitigasi bencana banjir terutama di kelurahan yang sering terjadi bencana banjir di Kecamatan Mojoroto.
5. Faktor pendukung selanjutnya adalah kesadaran masyarakat itu sendiri yaitu memiliki niat untuk menambah wawasan terkait dengan mitigasi bencana banjir di daerahnya agar bisa meminimalisir bencana di daerahnya.

3.3 Upaya Pemecahan Masalah Terhadap Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat terkait dengan Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Mojojoto

1. Mengadakan anggaran terkait dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada kelurahan yang membutuhkan demi menunjang proses pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana banjir.
2. Membuat jadwal diskusi rutin melalui Forum Pengurangan Resiko Bencana untuk dapat memfokuskan pembahasan tentang mitigasi banjir bersama dengan pemerintah dan masyarakat.
3. Salah satu hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan secara langsung di masyarakat di Kecamatan Mojojoto yang berfokus di kelurahan adalah belum bisa mencakup seluruh warga kelurahan masyarakat tersebut, maka upaya yang dilakukan selain melakukan sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana banjir di Kelurahan secara langsung juga melakukan sosialisasi dan pelatihan dengan membuat video menarik yang nantinya akan diupload di sosial media BPBD, dan di official account sosial media kelurahan tersebut maka cakupan dalam sosialisasi dan pelatihan akan lebih luas.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mitigasi bencana banjir sebelumnya juga di tulis oleh Salomo Payokwa pada tahun 2020, Anggun dkk (2020). Dua penelitian tersebut menemukan permasalahan dalam pelaksanaan pengurangan resiko bencana banjir yaitu terkait dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya usaha untuk melakukan pengurangan resiko bencana banjir didaerahnya, selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Salomo Payokwa terdapat fasilitas yang kurang memadai dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Distrik Sentani. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya bahwa pada penelitian ini penulis menemukan beberapa permasalahan yang sama yaitu terkait dengan belum maksimalnya tingkat kesadaran dan kemandirian masyarakat di Kecamatan Mojojoto dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir di daerah tempat tinggalnya terutama di kelurahan-kelurahan yang paling sering terjadi bencana banjir yaitu di Kelurahan Campurejo, Bujel dan Mojojoto, temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya karena terdapat kesamaan yaitu permasalahan dalam segi sumber daya manusianya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Salomo Payokwa yaitu terkait dengan fasilitas mitigasi bencana banjir, di Kecamatan Mojojoto sendiri sudah terdapat papan jalur evakuasi guna menginformasikan masyarakat jika bencana banjir terjadi, serta terdapat beberapa fasilitas dan perlengkapan dalam melakukan daur ulang sampah dan pembuatan biopori meskipun belum mencakup seluruh kelurahan, temuan ini menolak

penelitian sebelumnya dikarenakan sudah adanya beberapa fasilitas yang ada dibandingkan penelitian sebelumnya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hasan dkk (2022) memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis penulis kali ini yaitu fokus dalam pemberdayaan masyarakat bencana banjir terkait dengan manusia dan perbaikan infrastruktur hanya saja beda cakupan wilayah yang mana penelitian Hasan dkk mencakup wilayah kelurahan sedangkan pada penelitian kali ini mencakup kecamatan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pengamatan penulis dalam melaksanakan penelitian mengenai Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri Terkait Dengan Mitigasi Bencana Banjir Di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Provinsi Jawa Timur dapat ditarik kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BPBD Kota Kediri dalam membentuk organisasi masyarakat berbasis kebencanaan di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri sudah dilakukan cukup baik dikarenakan sudah terbentuk 8 keltana dan FPRB dari 14 kelurahan di Kecamatan Mojojoto, namun dalam pengembangannya masih perlu ditingkatkan dikarenakan untuk kegiatan forum diskusi keltana dan FPRB terutama untuk mengatasi permasalahan banjir di Kecamatan Mojojoto khususnya di kelurahan yang terdampak belum terjadwal rutin atau bisa dibilang menyesuaikan keadaan. Peningkatan kapasitas dan kemandirian oleh BPBD Kota Kediri kepada masyarakat terkait dengan sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana banjir di Kecamatan Mojojoto yang berfokus kepada mitigasi bencana banjir sudah cukup baik dibuktikan dari sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan BPBD ke kelurahan-kelurahan di Mojojoto terkait dengan menjaga saluran drainase agar tetap berfungsi dengan baik, yaitu dengan pengolahan sampah yang baik dan tidak boleh membuang sampah sembarangan seperti di selokan dan disungai, penyuluhan pembuatan biopori di lingkungan masyarakat agar masyarakat dapat memiliki skill dan bisa mandiri. Namun disini sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan BPBD belum mencakup semua warga masyarakat di kelurahan dikarenakan pada saat sosialisasi dan pelatihan perwakilan masyarakat yang datang, tidak semuanya.

Pemberdayaan masyarakat pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Mojojoto BPBD bekerjasama dengan DLHKP Kota Kediri dan Bappeda dalam menangani hal ini. Dari sisi pelestarian lingkungan yang dilakukan adalah sosialisasi dan pelatihan daur ulang sampah agar lebih bermanfaat, mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ataupun limbah secara sembarangan. Dalam pembangunan berkelanjutan diharapkan prodamas plus program Pemerintah Daerah Kota Kediri yang ada tanggung jawab Bappeda didalamnya dapat menjadi sumber dana untuk memenuhi sarana prasarana terkait dengan pengurangan resiko bencana banjir di Kecamatan Mojojoto.

Pemberdayaan masyarakat terkait pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana, BPBD bekerjasama dengan DPUPR salah satu contohnya adalah perbaikan pinggiran sungai yang terkikis dan longsor di

Kecamatan Mojoroto bersama dengan masyarakat, hal itu merupakan langkah nyata dalam melakukan pemeliharaan dan melibatkan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama dalam hal waktu dikarenakan pada pelaksanaannya hanya diberikan waktu oleh lembaga selama 3 minggu sedangkan permasalahan yang akan diteliti cukup kompleks berkaitan dengan sosialisasi, sarana prasarana, dan standaroperasional prosedur.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Provinsi Jawa Timur untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur pertama-tama dipanjatkan kehadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih dan karuniaNya. Terima kasih atas doa, kasih sayang, bimbingan dan motivasi yang tak terhingga yang diberikan oleh kedua orangtua tercinta Bapak Warsito dan Ibu Etti Wismayanti Musnamar. Penulis juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Drs. Raddana, M. Pd., M.Si selaku dosen pembimbing serta seluruh IKPTK Kota Kediri yang telah membantu selama proses penelitian, Saudara Kontingen Jawa Timur Angkatan 30 serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

IV DAFTAR PUSTAKA

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Penerbit Alfabeta.

Ife, Jim. 1997. Community Development, Creating Community Alternatives Vision, Analysis and Practice. Melbourne: Addison Wesley Longman.

Anggun, T., Putera, R. E., & Liesmana, R. (2020). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kecamatan Padang Selatan. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 123–137. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v1i2.2415>

Hasan, S., Riyadi, Rukayah, Y., Budyastomo, A. wimar, & Windasari. (2022). peran BPBD dalam penanggulangan banjir di Lodoloyong Ambarawa Semarang.

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol.7(Issue 1).

Payokwa, S., Tolikara, K., Program, P., Keamanan, S. M., & Publik, K. (n.d.).
*PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR
MELALUI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI DISTRIK
SENTANI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA.*

BNPB. (2022). Update Bencana Indonesia Tahun 2022. Diakses pada 21 September
2022, dari BNPB: <https://bnpb.go.id/infografis/update-bencana-indonesia-tahun-2022>

Kediri, BPBD Kota, 'Dokumen Kajian Resiko Bencana 2022'



